

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Pencapaian nilai perusahaan dilakukan untuk memaksimalkan tingkat kemakmuran para *stakeholder*. Nilai perusahaan sangat dibutuhkan, karena dengan peningkatan nilai perusahaan diharapkan mampu menarik para investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Dengan adanya peningkatan nilai perusahaan akan berpengaruh pula terhadap kesejahteraan karyawan. Oleh sebab itu, pihak yang ada di perusahaan dituntut untuk memanfaatkan kemampuan yang dimiliki dengan semaksimal mungkin agar perusahaan lebih unggul dalam bersaing dengan para kompetitif (Lestari, 2017).

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan, maka para investor wajib untuk mengetahui nilai dari suatu perusahaan tersebut. Nilai perusahaan merupakan suatu kondisi tentang posisi perusahaan saat ini sebagai bentuk kepercayaan para *stakeholder* terhadap perusahaan yang tercermin dari nilai aset dan harga saham perusahaan. Nilai perusahaan direfleksikan dari harga saham, jika harga saham perusahaan tinggi maka nilai perusahaan juga baik (Suarmita, 2017).

Harmono (2009) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang digambarkan oleh harga saham yang dibuat berdasarkan permintaan dan penawaran pasar modal dengan mempertimbangkan penilaian dari masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan, Gitman (2006) mengungkapkan bahwa nilai perusahaan adalah total aset yang akan diterima perusahaan dengan mengacu pada nilai aktual per lembar saham apabila saham perusahaan tersebut dijual. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan merupakan keberhasilan perusahaan yang sering dihubungkan

dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi.

Nilai perusahaan dapat diukur melalui harga saham dengan menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Rasio penilaian menurut Sudana (2011) adalah rasio yang berhubungan dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang diperdagangkan pada pasar modal. Weston (2008) mengungkapkan bahwa terdapat 3 metode pengukuran nilai perusahaan, yaitu (1) metode pengukuran nilai perusahaan dengan cara menghitung *Price Earning Ratio (PER)*; (2) metode pengukuran nilai perusahaan dengan cara menghitung *Price to Book Value (PBV)*; dan (3) metode pengukuran nilai perusahaan dengan menghitung *Tobins' Q*. Pengukuran dengan metode *Price to Book Value* telah dilakukan oleh Raharja (2014), Wira Pratama (2016), Lestari (2017), Ratna Puji Astuti (2018), dan Hana Tamara Putri (2019). Sedangkan, pengukuran nilai perusahaan dengan model *Tobin's Q* telah dilakukan oleh Reni Yendrawati (2013), Abdul Ghofar (2016), Indra Gunawan Siregar (2016), Nurhanimah (2018), Nanik Lestari (2018), dan Handini Narati Sari (2019).

Menurut Morenly dan Victoria (2015) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Laba, Likuiditas dan Inflasi. Sedangkan menurut Sri dan Decky (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah *Return on Asset*, *Return on Equity*, Risiko Perusahaan, *Loan to Deposit Ratio* dan *Non Performing Loan*.

Nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan laba, likuiditas, inflasi. *return on asset* dan *return on equity* saja melainkan terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti manajemen laba. Hana Tamara Putri (2017) menyatakan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh manajemen laba secara positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya nilai perusahaan disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba seperti rencana bonus, kontrak utang jangka

panjang dan penawaran saham perdana. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhanimah (2019) menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, Handini Narati (2017) menyatakan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dan mengungkapkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu kebijakan deviden.

Nilai perusahaan penting untuk diteliti karena mencerminkan pertumbuhan dan kinerja manajemen suatu perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dengan adanya penilaian dari pihak eksternal perusahaan terhadap aset perusahaan dan pertumbuhan nilai saham. Nilai perusahaan dapat ditingkatkan dengan memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan yang lebih ekonomis, efektif dan efisien (Suarmita, 2017).

Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham akan muncul pada proses memaksimalkan nilai perusahaan, konflik tersebut disebut dengan *Agency Problem*. *Agency Problem* muncul karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sedangkan pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer akan menambah biaya bagi perusahaan yang dapat menyebabkan penurunan keuntungan dan dapat berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan (Pertiwi, 2010). Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham dari perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pihak manajemen.

Nurhanimah (2019) berpendapat bahwa bentuk penyimpangan yang dilakukan manajemen yaitu dalam proses penyusunan laporan keuangan, karena manajer dapat menguasai tingkat laba yang ditampilkan pada laporan keuangan, bentuk penyimpangan manajer tersebut sering disebut dengan manajemen laba. Manajemen laba merupakan cara manajer untuk mengubah laporan keuangan yang bertujuan untuk mengelabui pemegang saham yang ingin mengetahui kondisi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkannya

(Dewi, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba merupakan cara manajer dalam meningkatkan atau menurunkan laba sesuai dengan keinginan manajer.

Terjadi atau tidaknya praktik manajemen laba telah diteliti oleh beberapa peneliti, seperti Dechow & Skinner (2000), Palliam & Shalhoub (2003) dan Gosh (2010). Dechow & Skinner (2000) menyatakan bahwa terdapat sikap pro dan kontra atas praktik manajemen laba, dimana pihak yang pro memandang bahwa manajemen laba boleh dilakukan dan bukan merupakan perilaku koruptif sepanjang dilakukan dalam koridor prinsip akuntansi berterima umum. Begitupun sebaliknya, pihak kontra menyatakan bahwa manajemen laba tidak berbeda dengan tindakan memanipulasi laba.

Menurut Watt dan Zimmerman (1986) dalam *positif accounting theory* terdapat tiga faktor yang mempengaruhi manajemen laba, yaitu:

1. *Bonus Plan Hypothesis*, manajemen laba akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi.
2. *Debt Covenant Hypothesis*, manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba.
3. *Political Cost Hypothesis*, semakin besar perusahaan maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba.

Manajemen laba merupakan cara manajer perusahaan untuk mengatur informasi yang ada di dalam laporan keuangan dengan tujuan mempengaruhi pemegang saham yang ingin mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan. Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Pada segi moral, manajer memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik saham dengan balasan manajer mendapat imbalan kompensasi sesuai dengan kontrak. Sehingga terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam perusahaan, dimana pihak pemilik saham dan pihak manajer berusaha untuk mencapai tingkat keberhasilan yang dikehendaki (Putri, 2017).

Sebagai pihak pengelola perusahaan, manajer lebih banyak mengetahui informasi mengenai kondisi internal perusahaan dan tujuan perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemegang saham. Manajer memiliki kewajiban untuk memberikan sinyal tentang kondisi perusahaan kepada pemilik saham. Sinyal yang diberikan oleh manajer dilakukan dengan mengungkapkan informasi akuntansi pada laporan keuangan (Putri, 2017).

Terdapat fenomena mengenai manajemen laba yang terjadi pada beberapa perusahaan besar di Indonesia, seperti PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Asuransi Jiwasraya, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau sering dikenal dengan Pelindo II, dan PT Asabri (Persero). Kasus yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menegaskan pemeriksaan terhadap Kejaksaan Agung dan Badan Pemerika Keuangan (BPK) terkait permasalahan gagal bayar kewajiban pembayaran polis yang dihadapi Asuransi Jiwasraya. Sekaligus langkah penyehatan dan penyelamatan yang dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tarkosunaryo selaku ketua umum IAPI mengatakan bahwa Kementerian BUMN harus berusaha memberantas dan menanggulangi dalam rangka mencegah terjadinya rekayasa laporan keuangan. Laporan keuangan harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, tidak boleh direkayasa dengan alasan apapun. Tarkosunaryo mengatakan bahwa para direksi harus menyusun laporan keuangan dengan lengkap dan jelas yang kemudian disusun berdasarkan kaidah penulisan laporan keuangan yang berlaku dengan memuat laporan neraca dan laporan laba rugi untuk dua tahun terakhir, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan yang diakui oleh Pemerintah Indonesia (Novita Intan, 2020)

Dalam kasus PT Pelindo II, Badan Pemerika Keuangan (BPK) siap untuk menuntaskan hasil audit dugaan korupsi yang terjadi di PT Pelindo II. Adapun kerugiannya diramal mencapai Rp 6 triliun. Selaku ketua BPK, Agung Firman

mengatakan bahwa PT Pelindo II ini sebelumnya diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Meskipun demikian, dalam hasil audit tersebut ada perbedaan hasil audit investigatif. Dari hasil audit tersebut ditemukan perhitungan kerugian negara, dan BPKP selaku auditor pada PT Pelindo II tidak secara aktif melakukan audit. Lalu kemudian, menurut Agung, BPKP menemukan dugaan korupsi terhadap pengadaan *Quay Container Crane*. Tetapi, pemeriksaan terkait dugaan korupsi tersebut tidak terselesaikan yang kemudian diambil alih oleh BPK. Dalam menelusuri persoalan tentang dugaan kasus korupsi QCC, BPK tidak bisa bekerja sendirian. Mereka membutuhkan tenaga ahli untuk menjawab persoalan teknis. Maka dari itu, sampai saat ini berdasarkan perhitungan oleh BPK, dari 4 laporan keuangan Pelindo II yang telah diaudit oleh BPK kerugiannya mencapai lebih dari Rp 6 triliun. Kemudian BPK menyerahkan dugaan kasus korupsi QCC sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, agar diselidiki lebih lanjut apakah benar terdapat praktik korupsi atau tidak di dalam persoalan Pelindo II. Selain itu, terdapat kasus pembangunan New Kalibaru tahap 1, dengan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun dengan potensi gagal konstruksi dan kerugian total loss Rp 7 triliun. Terakhir kasus Global Bon Pelindo II kerugian negara mencapai Rp 741 miliar. Sehingga total kerugian negara dalam kasus Pelindo II mencapai Rp 15 triliun (Cantika Adinda Putri, 2020)

Selain itu, terdapat fenomena lain yang terjadi pada PT Asabri (Persero) yang diduga terdapat kasus korupsi di atas Rp 10 triliun. Saham-saham milik PT Asabri dikabarkan mengalami penurunan sepanjang tahun 2019. Penurunan harga saham tersebut mencapai hampir 90 persen. Hadiyanto selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pihaknya hanya memerintahkan Asabri dalam hal penempatan investasi harus memperhatikan manfaat jangka panjang dan memberikan keuntungan ke perusahaan. Selaku Sekretaris Perusahaan Asabri, Djoko Rachmadhy menjelaskan bahwa rencana investasi Asabri berjalan sesuai dengan arahan dari komite investasi yang sudah mempertimbangkan aspek regulasi dan tata kelola perusahaan. Menurut Djoko, pemilihan aset termasuk saham sudah sesuai dengan aturan yang

mengikat Asabri. Berdasarkan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hingga November 2019, Asabri mempunyai portofolio di 14 saham dengan kepemilikan di atas 5 persen, yaitu BBYB sebanyak 20,13 persen, FIRE sebanyak 23,66 persen, HRTA sebanyak 5,26 persen, ICON sebanyak 5,02 persen, IIKP sebanyak 11,58 persen, INAF sebanyak 13,92 persen, MYRX sebanyak 5,40 persen, NIKL sebanyak 10,31 persen, PCAR sebanyak 25,14 persen, POLA sebanyak 7,65 persen, POOL sebanyak 7,43 persen, PPRO sebanyak 5,33 persen, SDMU sebanyak 18,06 persen, dan SMRU sebanyak 6,61 persen (Kompas, 2020)

Fenomena lain terkait dengan manipulasi laporan keuangan juga terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 memperoleh laba bersih perusahaan yang dianggap janggal. PT Garuda Indonesia mencatatkan laba bersih Rp 11,33 miliar. Laba itu melambung karena terdapat pendapatan dari usaha lain yang totalnya mencapai US\$ 306,88 juta. Tetapi, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ditemukan terdapat dua komisararis yang tidak menandatangani laporan keuangan. Mereka merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia. Akan tetapi, pengakuan itu dianggap tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 23, karena manajemen Garuda Indonesia mengakui adanya pendapatan dari Mahata sebesar US\$ 239.940.000 yang diantaranya merupakan bagian dari bagi hasil yang didapat dari PT Sriwijaya Air. Namun, uang tersebut masih dalam bentuk piutang dan diakui oleh perusahaan masuk ke dalam pendapatan. Pemerintah selaku Pemegang saham terbesar menyetujui laporan keuangan tersebut. Enny Sri Hartiati mengemukakan bawa apa yang dilakukan PT Garuda Indonesia, Jika terungkap maka akan merusak citra perusahaan (Danang Sugianto, 2019)

Dengan melihat contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan *corporate governance*. *Corporate*

*governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis. Dalam penerapan *corporate governance* terdapat beberapa mekanisme yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen. Mekanisme *corporate governance* ini akan meningkatkan pengawasan bagi perusahaan, sehingga melalui pengawasan tersebut diharapkan kinerja perusahaan akan lebih baik (Hutapea, 2013).

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan dengan pengawasan melalui *good corporate governance*. Astrinika (2019) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan cara atau mekanisme untuk memberikan keyakinan kepada para investor perusahaan akan diperolehnya return atas investasi mereka. *Corporate governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham (Darwis, 2012).

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Hana Tamara Putri (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan pada Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba yang diukur dengan manajemen laba berbasis nyata mempengaruhi nilai perusahaan.

Penelitian Wahyu Safarina Dewi (2017) menganalisis Pengaruh *Earnings Management* pada Laporan Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Komisaris Independen dan Kualitas Audit sebagai *Moderating Variable*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *earning management* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, komisaris independen merupakan variabel pemoderasi pengaruh *earning management* terhadap nilai perusahaan dan kualitas audit bukan merupakan variabel pemoderasi pengaruh *earning management* terhadap nilai perusahaan.

Nurhanimah (2018) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh *Earnings Management* dan *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktur



Kepemilikan sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba mempengaruhi nilai perusahaan, sedangkan penghindaran pajak tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Peneliti juga menemukan kepemilikan manajerial tidak memoderasi hubungan antara manajemen laba dan penghindaran pajak pada nilai perusahaan. Kepemilikan Institusional memoderasi manajemen laba pada nilai perusahaan tetapi tidak memoderasi hubungan antara penghindaran pajak pada nilai perusahaan.

Nanik Lestari (2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan begitupun dengan variabel moderasi kualitas audit tidak mempengaruhi hubungan manajemen laba terhadap nilai perusahaan.

Selain itu, Handini Narati Sari (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Manajemen Laba dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, kebijakan deviden memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Hasil yang tidak konsisten menunjukkan adanya faktor lain yang turut mempengaruhi hubungan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, pada penelitian ini ditambahkan struktur *corporate governance* sebagai variabel pemoderasi yang diduga mampu memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai manajemen laba, nilai perusahaan dan *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan kualitas audit terhadap nilai perusahaan dalam penelitian dengan judul: **“Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktur Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, tentang pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan dengan *corporate governance* sebagai pemoderasi, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah *corporate governance* yang diproksi kepemilikan manajerial memoderasi atas hubungan manajemen laba dengan nilai perusahaan?
3. Apakah *corporate governance* yang diproksi kepemilikan institusional memoderasi atas hubungan manajemen laba dengan nilai perusahaan?
4. Apakah *corporate governance* yang diproksi kualitas audit memoderasi atas hubungan manajemen laba dengan nilai perusahaan?
5. Apakah *corporate governance* yang diproksi dewan komisaris independen memoderasi atas hubungan manajemen laba dengan nilai perusahaan?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diproksi kepemilikan manajerial memoderasi atas hubungan manajemen laba dengan nilai perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diproksi kepemilikan institusional memoderasi atas hubungan manajemen laba dengan nilai perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diproksi kualitas audit memoderasi atas hubungan manajemen laba dengan nilai perusahaan.

5. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diproksi dewan komisaris independen memoderasi atas hubungan manajemen laba dengan nilai perusahaan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan kedepannya dapat bermanfaat bagi:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan dengan struktur *corporate governance* sebagai variabel moderasi serta sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya perilaku manajemen laba dan pentingnya nilai perusahaan untuk dapat memiliki kualitas laporan keuangan yang baik. Bagi struktur *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas auditor dan dewan komisaris independen diharapkan dapat bekerja semaksimal mungkin dalam membatasi tindakan manajemen laba yang dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan.